

**SKRIPSI**

**“Keabsahan Penetapan Hak Tanggungan Menjadi Sita Jaminan  
(Studi Kasus No: 20/PDT.G/PLW/2010/PN.LP) ”**

*Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**ANNISA FAKHIRA RAMADANIA SHAREN**

**BP: 1410111060**

**Program Kekhususan: Perdata Murni (PK I)**



**Pembimbing :**

**Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.**

**Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2019**

**No. Reg: 53/PKI/III/2019**

**KEABSAHAN PENETAPAN HAK TANGGUNGAN MENJADI SITA JAMINAN  
(STUDI KASUS NO:20/PDT.G/PLW/2010/PN.LP)**

**(Annisa Fakhira Ramadania Sharen, 1410111060, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK 1 (Perdata Murni), 75 halaman, 2019)**

**ABSTRAK**

Kegiatan lembaga perbankan yaitu menghimpun dana melalui simpanan dan menyalurkannya kembali melalui kredit, dalam penyalurannya biasanya dibutuhkan suatu jaminan, jaminan yang umum dipakai dalam dunia perbankan yaitu jaminan hak tanggungan, hak tanggungan mempunyai suatu ciri-ciri yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan bagi pemegangnya dan tidak dapat diletakkan sita eksekusi di atasnya. Dalam skripsi ini yang menjadi perumusan masalah yang dibahas adalah: (1) Apa yang melatar belakangi terjadinya perkara perdata nomor: 20/PDT.G/PLW/2010/PN.LP tentang Penetapan hak tanggungan menjadi sita jaminan. (2) Bagaimanakah keabsahan penetapan hak tanggungan menjadi sita jaminan dalam perkara no: 20/PDT.G/PLW/2010/PN.LP menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menganalisis suatu permasalahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan latar belakang terjadinya perkara perdata nomor :20/PDT.G/PLW/2010/PN.LP tentang Penetapan hak tanggungan menjadi sita jaminan serta apakah hak tanggungan yang dijadikan sita jaminan dalam perkara perdata No :20/PDT.G/PLW/2010/PN.LP tersebut sah menurut Undang-Undang yang berlaku. Obyek hak tanggungan yang dijadikan sita jaminan oleh pengadilan Lubuk Pakam karena perkara antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita adalah sah, dikarenakan hak tanggungan yang dimiliki oleh Pelawan melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dan dinyatakan cacat hukum. Dalam melakukan setiap perjanjian harus ada itikad baik dari para pihak sehingga tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari.